

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pembangunan, sewajarnya diawali dengan proses perencanaan yang matang. Salah satu kebutuhan perencanaan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan OPD Kecamatan Purwodadi menyusun Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Purwodadi serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Kecamatan Purwodadi.

Penyusunan Renstra Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD.
- c. Tahapan penetapan Renstra PD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Purwodadi selaku Kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Purworejo.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan hierarki Rencana Strategis PD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2025-2030 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program /kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemsyarakatan.
- b. Memberikan gambaran rencana program untuk lima tahun ke depan (2025-2029) yang terukur dan terarah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik sekaligus menjadi acuan bagi Kecamatan Purwodadi untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- c. Menjabarkan visi misi RPJMD

2. Tujuan

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan sekala prioritas pada kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
- d. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Purwodadi sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rrencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan Purwodadi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah serta Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 serta Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dukungan terhadap nasional provinsi dan kegiatan unggulan daerah serta indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

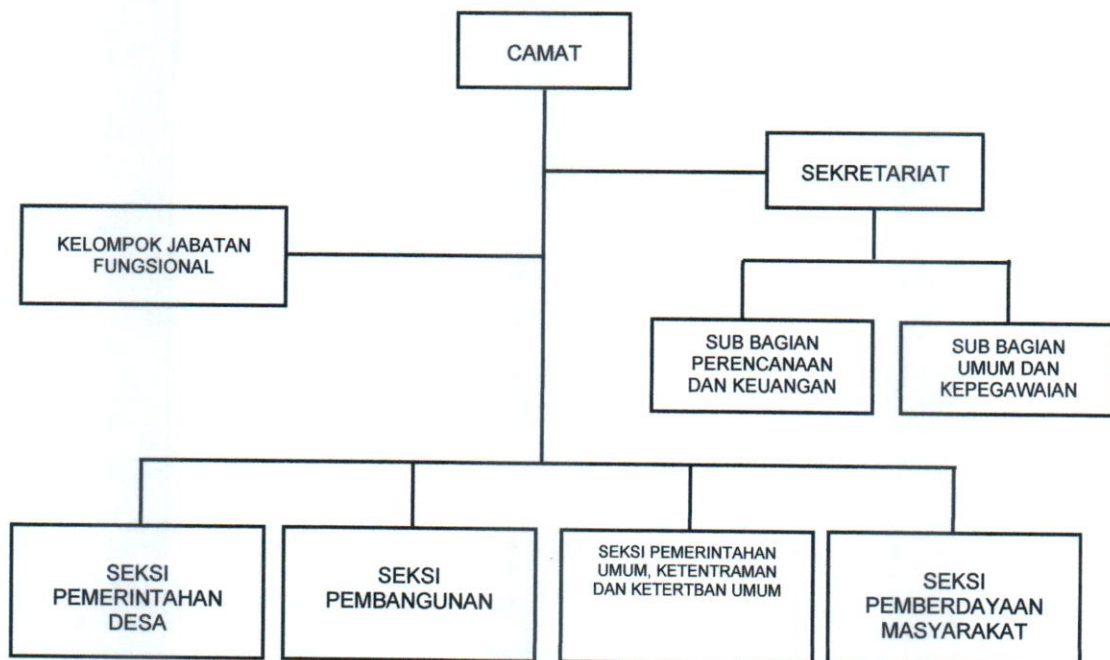
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Susunan Organisasi Kecamatan Purwodadi terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat, membawahi
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan Desa
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi PD



Dalam pelaksanaan pelayanan, Kecamatan Purwodadi memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan sub bagian.

1. Camat mempunyai tugas pokok:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Selain melaksanakan tugas, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 3. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

Tugas Camat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- (1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
- (2) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
- (3) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan Sekretariat

(1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi

secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat tugas dan sesuai dengan fungsi.

Sekretariat Kecamatan, membawahkan:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:

- a. merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
- b. melaksanakan pengadministrasian keuangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- a. melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
- b. melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
- c. melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
- d. melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
- e. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

Seksi Pemerintahan Desa

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa, yang meliputi:

- a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- h. melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- j. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
 3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
- b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
 1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
 2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
 1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;

2. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
3. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
 1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
- b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
 1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
 2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
 1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai Kecamatan dan Sekretaris Desa PNS berdasarkan Golongan, Jabatan / Eselonering dan Pendidikan sebanyak 14 pegawai Kecamatan ASN ditambah dengan 3 orang tenaga kontrak. Adapun rincian pegawai berdasarkan golongan kepangkatan yaitu :

- a. Berdasarkan Golongan :
 - Golongan IV : 2 orang
 - Golongan III : 6 orang
 - Golongan II : 5 orang
 - PPPK Golongan VII : 1 orang

 Jumlah : 14 orang

- b. Berdasarkan Jabatan / Eselonering :
 - Eselon III/A : 1 orang
 - Eselon III/B : 1 orang
 - Eselon IV/A : 4 orang
 - Eselon IV/B : 1 orang
- c. Berdasarkan Pendidikan :
 - Sarjana Strata 2 : 1 orang
 - Sarjana Strata 1 : 5 orang
 - Diploma : 2 orang
 - SMU/Sederajat : 6 orang

Kepemilikan Aset BMD tahun 2025 :

KIB A : Tanah

Luas tanah , bangunan Kecamatan Purwodadi : 35.588

KIB B : Peralatan dan Mesin

Jumlah aset :

- Genset : 1 unit
- Mobil dinas : 1 unit
- Motor dinas : 8 unit
- AC : 2 unit
- PC unit : 6 unit
- Laptop : 8 unit

Netbook : 2 unit
 Printer : 8 unit
 Televisi : 2 unit
 Lemari besi : 2 unit
 Rak Besi : 5 unit
 Filling besi : 7 unit
 Lemari Kaca : 1 unit
 Lemari Kayu : 6 unit
 Rak Kayu : 3 unit
 Kursi kayu / kerja : 16 unit
 Zice : 4 unit
 Meja Rapat : 6 unit
 Meja tulis : 30 unit

KIB C : Gedung dan Bangunan

Luas tanah kantor dan bangunan Kecamatan Purwodadi adalah 426 m², dan memiliki 1 rumah dinas.

KIB D : Jalan, irigasi dan Jaringan

Jaringan distribusi lain – lain (instalasi listrik) : 1 paket

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				87.70	88.00	88.30	88.50	89.00	89.50	85.25	86.06	90.31	91.94			1.03	1.02	0.98	0.96		
2	Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				87.70	88.00	88.30	88.50	89.00	89.50	85.25	86.06	90.31	91.94			1.03	1.02	0.98	0.96		
3	Program : Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		
4	Program : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		
5	Program : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		
6	Program : Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		
7	Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		
8	Program : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.384.864.511	2.324.717.437	2.254.590.420	1.885.966.127	1.822.003.780	2.790.456.510	2.255.141.538	2.159.556.078	1.929.376.675	1.874.454.821			95%	93%	86%	99%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.384.864.511	2.321.792.437	2.251.590.420	1.884.966.127	1.822.700.167	2.790.456.510	2.255.141.538	2.156.631.078	1.928.126.675	1.873.454.821			95%	93%	86%	99%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.100.000	1.500.000	250.000		125.000		1.100.000	-	250.000				100%	0%	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1.825.000	1.500.000	750.000	1.000.000	125.000		1.825.000	1.250.000	750.000				100%	83%	100%		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.000.000	750.000	750.000	125.000			1.375.000	750.000					69%	100%		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2.000.000	750.000	750.000	125.000			1.375.000	750.000					69%	100%		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			2.000.000	1.250.000	625.000	125.000			2.000.000	1.250.000					100%	100%		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			2.000.000	1.250.000	625.000	125.000			2.000.000	1.250.000					100%	100%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.718.400	5.930.000	1.750.000	125.000			3.718.400	5.930.000					100%	100%		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3.718.400	5.930.000	1.750.000	125.000			3.718.400	5.930.000					100%	100%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.545.000	96.512.900	85.202.600	89.442.060	63.406.400	49.291.000	37.545.000	96.372.900	80.977.600	89.440.900			100%	100%	95%	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		810.000	2.562.800	3.514.500	3.509.000	993.600		810.000	2.545.200	3.514.500				100%	99%	100%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.570.000	5.891.700	5.293.500	3.442.000	1.384.200		3.570.000	5.886.900	5.293.500				100%	100%	100%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		13.710.000	14.460.600	20.328.000	18.478.800	19.152.000		13.710.000	13.146.000	20.327.400				100%	91%	100%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		10.262.000	12.108.200	16.076.000	8.983.600	10.690.100		10.262.000	12.108.200	16.076.000				100%	100%	100%		

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.564.000	1.600.000	1.332.000	1.332.000			1.564.000	1.356.000	1.332.000				100%	85%	100%		
Penyediaan Bahan/Material		17.876.900	17.876.900	17.971.500	17.207.700	10.659.100		17.876.900	17.876.900	17.971.500				100%	100%	100%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu			6.160.000	1.500.000		750.000			4.125.000	1.500.000					67%	100%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.545.000	810.000	2.562.800	3.514.500	10.203.300	5.537.000	37.545.000	48.580.000	22.967.200	21.476.000			100%	5998%	896%	611%		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			966.200	1.950.000	250.000	125.000			966.200	1.950.000					100%	100%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		92.118.000	250.822.500	26.588.100	19.904.500			89.732.000	250.000.000	26.400.000				97%	100%	99%		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			250.822.500						250.000.000						100%			
Pengadaan Mebel		27.880.000		26.588.100	19.904.500			26.174.000		26.400.000				94%		99%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		64.238.000						63.558.000						99%				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.185.208	50.014.644	73.093.768	95.446.924	134.339.800	130.735.500	65.185.208	45.408.328	70.183.379	77.452.574			100%	91%	96%	81%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.003.600						18.003.600						100%					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.028.000	37.703.976	42.894.616	51.536.468	48.919.200	48.067.500	31.872.295	33.230.536	40.554.118	44.215.294			97%	88%	95%	86%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.153.608	12.310.668	30.199.152	43.910.456	82.614.000	82.668.000	14.153.608	12.177.792	29.629.261	33.237.280			100%	99%	98%	76%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.566.000	75.887.800	75.887.800	86.534.000	72.063.000	86.475.000	64.566.000	75.887.659	124.473.000	86.533.774			100%	100%	164%	100%		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.800.000	43.055.000	43.055.000	34.794.000	38.220.000	34.880.000	26.800.000	43.054.859	25.475.800	34.793.774			100%	100%	59%	100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.692.000	11.850.000	10.540.000	15.800.000			4.516.000	11.850.000					96%	100%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14.378.000	9.684.000	6.410.000	6.410.000	10.670.000		14.378.000	9.684.000	6.410.000				100%	100%	100%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.868.000	18.454.800	82.811.200	31.040.000	14.453.000	20.855.000	23.868.000	18.454.800	82.811.200	31.040.000			100%	100%	100%	100%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.898.000		1.986.000	2.440.000	2.440.000	4.270.000	13.898.000		1.986.000	2.440.000			100%		100%	100%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	132.441.000	75.656.600	67.881.400	54.130.000	12.955.000	4.200.000	129.881.000	75.656.600	66.385.900	54.130.000			98%	100%	98%	100%		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	131.441.000	28.495.000	26.991.000	9.835.000	5.575.000		128.881.000	28.495.000	26.904.200	9.835.000			98%	100%	100%	100%		
Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah yang ada di kecamatan		17.350.000	25.063.000	4.950.000	2.925.000			17.350.000	25.063.000	4.950.000				100%	100%	100%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	131.441.000	11.145.000	1.928.000	4.885.000	2.650.000		128.881.000	11.145.000	1.841.200	4.885.000			98%	100%	95%	100%		

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.000.000	27.266.400	25.780.400	34.690.000	6.975.000	3.000.000	1.000.000	27.266.400	25.736.700	34.690.000			100%	100%	100%	100%			
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		24.600.700	22.852.400	26.105.000	4.325.000	600.000		24.600.700	22.808.700	26.105.000				100%	100%	100%			
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						1.800.000													
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.000.000	2.665.700	2.928.000	8.585.000	2.650.000	600.000	1.000.000	2.665.700	2.928.000	8.585.000			100%	100%	100%	100%			
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		6.500.000	4.878.000	1.850.000				6.500.000	3.528.000	1.850.000				100%	72%	100%			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		6.500.000	4.878.000	1.850.000				6.500.000	3.528.000	1.850.000				100%	72%	100%			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		13.395.200	10.232.000	7.755.000	405.000	1.200.000		13.395.200	10.217.000	7.755.000				100%	100%	100%			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan			964.000	1.375.000					964.000	1.375.000						100%	100%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		13.395.200	9.268.000	6.380.000	405.000	1.200.000		13.395.200	9.253.000	6.380.000				100%	100%	100%			

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.800.000	61.940.000	81.095.800	153.920.600	91.264.000	5.370.717.300	1.800.000	61.840.000	81.064.800	153.920.600			100%	100%	100%	100%		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.800.000	61.940.000	81.095.800	153.920.600	91.264.000	5.370.717.300	1.800.000	61.840.000	81.064.800	153.920.600			100%	100%	100%	100%		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			14.188.000	21.550.600	21.463.000	17.317.300			14.188.000	21.550.600					100%	100%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.800.000	61.940.000	66.907.800	132.370.000	69.801.000	5.353.400.000	1.800.000	61.840.000	66.876.800	132.370.000			100%	100%	100%	100%		
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.030.000	38.400.000	22.377.800	38.855.000	10.291.000	3.000.000	34.030.000	38.400.000	22.377.800	38.855.000			100%	100%	100%	100%		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34.030.000	38.400.000	22.377.800	34.795.000	10.291.000	3.000.000	34.030.000	38.400.000	22.377.800	34.795.000			100%	100%	100%	100%		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34.030.000	38.400.000	20.257.000	17.385.000	3.190.000	1.500.000	34.030.000	38.400.000	20.257.000	17.385.000			100%	100%	100%	100%		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2.120.800	17.410.000	7.101.000	1.500.000			2.120.800	17.410.000					100%	100%		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4.060.000						4.060.000						100%		

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4.060.000						4.060.000						100%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		20.850.000	36.737.000	33.320.000	17.050.000	24.300.000		20.850.000	36.737.000	33.320.000				100%	100%	100%		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		20.850.000	36.737.000	33.320.000	17.050.000	24.300.000		20.850.000	36.737.000	33.320.000				100%	100%	100%		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						11.900.000												
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		13.940.000	3.719.000	6.260.000	3.710.000			13.940.000	3.719.000	6.260.000				100%	100%	100%		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		6.910.000	33.018.000	27.060.000	13.340.000	12.400.000		6.910.000	33.018.000	27.060.000				100%	100%	100%		

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	228.321.000	228.474.900	122.805.500	95.185.000	37.595.000	12.600.000	228.321.000	228.354.900	122.757.400	95.165.000			100%	100%	100%	100%		
Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	228.321.000	228.474.900	122.805.500	95.185.000	37.595.000	12.600.000	228.321.000	228.354.900	122.757.400	95.165.000			100%	100%	100%	100%		
Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		32.114.000	4.424.700	6.510.000	2.385.000	600.000		32.114.000	4.388.000	6.510.000				100%	99%	100%		
Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		16.973.000	3.125.000	9.580.000	3.985.000	1.500.000		16.953.000	3.125.000	9.580.000				100%	100%	100%		
Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		50.141.000	2.794.000	8.330.000	2.120.000	1.500.000		50.041.000	2.794.000	8.330.000				100%	100%	100%		
Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		104.800.900	82.276.600	43.760.000	20.750.000	7.200.000		104.800.900	82.265.200	43.760.000				100%	100%	100%		
Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			17.994.800			600.000			17.994.800						100%			
Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		11.920.000	2.756.400	18.200.000	4.240.000	1.200.000		11.920.000	2.756.400	18.180.000				100%	100%	100%		
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		12.526.000	2.277.000	1.700.000				12.526.000	2.277.000	1.700.000				100%	100%	100%		
Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	31.060.000		4.575.000	4.155.000	1.200.000		30.260.000		4.575.000	4.155.000			97%		100%	100%		
Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga			1.291.000	975.000	1.590.000				1.291.000	975.000					100%	100%		

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tujuan:						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	85,25	85,25	86,03	90,31	91,94	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	76,13	-	-	66,51	
2	Sasaran						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	85,25	85,25	86,03	90,31	91,94	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	76,13	-	-	66,51	
3	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	
7	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	
8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo pada lima tahun mendatang menghadapi sejumlah tantangan sekaligus membuka berbagai peluang strategis. Hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Purworejo, serta KLHS menunjukkan bahwa dinamika pembangunan daerah menuntut pelayanan publik yang semakin adaptif, responsif, dan inovatif.

Dari sisi tantangan, Kecamatan Purwodadi masih menghadapi kesenjangan kualitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kemampuan analisis pelayanan berbasis data. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk aksesibilitas di beberapa wilayah pedesaan, menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan layanan. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa perkembangan tata ruang dan pertumbuhan wilayah menuntut perangkat daerah lebih adaptif dalam mengantisipasi kebutuhan pelayanan, misalnya terkait peningkatan mobilitas masyarakat, perubahan fungsi lahan, serta perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari hasil analisis KLHS, isu lingkungan seperti kerentanan bencana alam (banjir, tanah longsor), degradasi lingkungan, dan keterbatasan daya dukung lahan menjadi tantangan tambahan bagi pelayanan publik, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Meski demikian, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Purwodadi. Pertama, arah kebijakan nasional dan provinsi yang menekankan pada transformasi digital pelayanan publik menjadi momentum untuk memperkuat inovasi

layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat secara daring. Kedua, potensi pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Purworejo, termasuk adanya proyek infrastruktur regional dan konektivitas dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, membuka kesempatan bagi Kecamatan Purwodadi untuk mengembangkan pelayanan yang mendukung aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Ketiga, dukungan masyarakat serta meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas mendorong perangkat daerah untuk membangun layanan yang lebih partisipatif dan responsif. Selain itu, hasil analisis KLHS menunjukkan adanya peluang penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan dalam inovasi pelayanan publik ramah lingkungan.

Dengan mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Kecamatan Purwodadi diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah administrasi kecamatan. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Purwodadi memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan yang adil, mudah diakses, dan berkualitas.

Sasaran utama pelayanan adalah masyarakat umum, yaitu seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Purwodadi. Mereka menjadi penerima layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan sederhana, serta berbagai fasilitasi program pembangunan. Selain itu, pemerintah desa beserta perangkatnya menjadi kelompok sasaran penting mengingat peran desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan hadir untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta koordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Kelompok lain yang menjadi perhatian adalah masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Mereka memerlukan layanan publik yang inklusif, perlindungan sosial, serta akses yang lebih mudah terhadap program-program pemerintah. Di sisi lain, pelaku ekonomi lokal seperti petani, pedagang, dan pelaku UMKM juga menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi perizinan, penguatan kapasitas usaha, dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain itu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok kepemudaan juga menjadi kelompok sasaran layanan yang penting. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat kecamatan maupun desa. Sementara itu, dari sisi internal pemerintahan, aparatur sipil negara dan perangkat

daerah lain juga menjadi kelompok sasaran dalam rangka koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas sektor di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Purwodadi tidak hanya berfokus pada masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup kelompok rentan, pelaku usaha, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga aparat pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan kecamatan bersifat menyeluruh dan inklusif, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Purwodadi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029, Laporan KLHS RPJMD 2025–2029, serta penjarangan aspirasi masyarakat melalui perangkat daerah, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Purwodadi. Permasalahan tersebut muncul sebagai refleksi adanya kesenjangan antara kondisi ideal pelayanan publik yang diharapkan dengan realitas capaian pembangunan yang ada saat ini.

Permasalahan dominan yang dihadapi antara lain:

1. Kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang belum optimal, terutama dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun keterjangkauan layanan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan.
3. Kapasitas sumber daya manusia aparat yang belum merata, baik dari segi kompetensi teknis maupun manajerial, sehingga berdampak pada kualitas layanan yang diselenggarakan perangkat daerah.
4. Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu yang membutuhkan integrasi lintas sektor.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat dalam mengakses layanan, serta belum mendukung pelayanan prima.
6. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pelayanan masih rendah, sehingga aspirasi yang muncul belum sepenuhnya terakomodasi secara sistematis.

Dengan memperhatikan permasalahan dominan tersebut, terlihat adanya kebutuhan untuk memperkuat kualitas, pemerataan, dan inovasi pelayanan perangkat daerah agar dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah lima tahun ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, serta keterkaitannya dengan isu KLHS RPJMD 2025–2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, maka dapat dirumuskan isu strategis perangkat daerah sebagai berikut

Tabel 2.1 Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Misinformasi dan disinformasi	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
	Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah			Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan		Cyber insecurity			
	Pelayanan publik prima belum merata		Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif					

Isu utama yang perlu mendapat perhatian meliputi: penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan rendahnya akuntabilitas kinerja; peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah guna memperkuat stabilitas dan daya saing; percepatan transformasi digital pelayanan publik sebagai respon atas tuntutan era digital dan ancaman keamanan siber; pemerataan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; serta penguatan stabilitas, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam mendukung pembangunan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2025-2030 yaitu :

“Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”

Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri) 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2030 diwujudkan dalam “Purworejo Berseri”.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kecamatan Purwodadi mendukung Misi ke 5, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif, serta berbasis teknologi informasi, maka ditetapkan tujuan strategis perangkat daerah Kecamatan Purwodadi yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang ditunjukkan melalui peningkatan Nilai SAKIP perangkat daerah.
2. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perangkat daerah.

Dengan demikian, indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan ini adalah:

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut didukung oleh 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan sarana serta prasarana kerja, faktor-faktor ini sangatlah berpengaruh terhadap tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perangkat daerah dimana apabila salah satu factor tersebut tidak ada maka dapat berpengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan perangkat daerah.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi sebagai langkah pemfokusan dalam Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi adalah “Meningkatkan kualitas

layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah”.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi adalah “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat ”. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi beserta indikator dan targetnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	92,00	92,15	92,30	92,45	92,60	92,75	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	92,00	92,15	92,30	92,45	92,60	92,75	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah.

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kecamatan Purwodadi pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat	Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat	Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RPJMD 2026	Arah Kebijakan RENSTRA 2026	
		Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkada, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2027	Arah Kebijakan RENSTRA 2027	
		Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkada, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
		Arah Kebijakan RPJMD 2028	Arah Kebijakan RENSTRA 2028	
Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan,			

		Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
	Arah Kebijakan RPJMD 2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2029	
	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	
	Arah Kebijakan RPJMD 2030	Arah Kebijakan RENSTRA 2030	
	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa	

BAB VI
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.
 - 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 7) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - 8) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - 9) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan hingga aktivitas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 berikut ini :

Tabel 4.1 Program?Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)				
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
				Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
						Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	
						Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	

					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029**

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	66,51 91,94	70,45 92,15	72,89 92,3	75,33 92,45	77,76 92,6	80,2 92,75	80,2 92,75	80,2 92,75	80,2 92,75	80,2 92,75					
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	66,51	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	80,2	80,2	80,2	80,2					
7.01.00	KECAMATAN					3.058.333.010	3.088.916.000	2.189.224.000	2.189.224.000	2.189.224.000	2.189.224.000	2.189.224.000	2.189.224.000	2.189.224.000					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat	Kecamatan Purwodadi		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	3	750.000	3	750.000	3	750.000	3	750.000	3	750.000	15			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	15	375.000	20	375.000	20	375.000	20	375.000	20	375.000	95			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	16	250.000	16	250.000	16	250.000	16	250.000	16	250.000	80			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Dokumen	0	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	5			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	2.790.706.510	1	2.803.026.500	1	1.921.597.500	1	1.921.597.500	1	1.921.597.500	5			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	18	2.790.456.510	18	2.802.776.500	18	1.921.347.500	18	1.921.347.500	18	1.921.347.500	18			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	6	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	60			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	5			
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	5			
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	5			
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	4	125.000	4	125.000	4	125.000	4	125.000	4	125.000	20			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	5			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	5			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	49.291.000	1	49.378.000	1	49.291.000	1	49.291.000	1	49.291.000	5			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	993.600	1	993.600	1	993.600	1	993.600	1	993.600	1			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1.384.200	1	1.460.800	1	1.384.200	1	1.384.200	1	1.384.200	1			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	19.152.000	1	19.152.000	1	19.152.000	1	19.152.000	1	19.152.000	1			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	10.690.100	1	10.690.100	1	10.690.100	1	10.690.100	1	10.690.100	1			
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	10.659.100	1	10.669.500	1	10.659.100	1	10.659.100	1	10.659.100	1			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1	5.537.000	1	5.537.000	1	5.537.000	1	5.537.000	1	5.537.000	1			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1	125.000	1			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Unit	2	0		4	18.176.000	0		0		0		4			
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	0	0	4	18.176.000	0	0	0	0	0	0	4			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	130.735.500	24	130.735.500	24	130.735.500	24	130.735.500	24	130.735.500	120			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	48.067.500	12	48.067.500	12	48.067.500	12	48.067.500	12	48.067.500	60			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	82.668.000	12	82.668.000	12	82.668.000	12	82.668.000	12	82.668.000	60			
7.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	5	86.475.000	5	86.475.000	6	86.475.000	5	86.475.000	5	86.475.000	26			
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	15.800.000	7	15.800.000	5	15.000.000	5	15.800.000	5	15.800.000	5			
7.01.01.2.08.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	5	800.000	0	0	0	0	5			
7.01.01.2.08.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	12	10.670.000	12	10.670.000	8	10.670.000	8	10.670.000	8	10.670.000	8			
7.01.01.2.08.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	20.855.000	2	20.855.000	1	20.855.000	1	20.855.000	1	20.855.000	1			
7.01.01.2.08.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	7	4.270.000	7	4.270.000	6	4.270.000	6	4.270.000	6	4.270.000	6			
7.01.01.2.08.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	91,94	92,15		92,3		92,45		92,6		92,75		92,75			
7.01.00	KECAMATAN						114.817.300		313.850.000		114.817.000		116.631.000		118.475.000				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	4.200.000	100	10.605.000	100	4.200.000	100	4.266.000	100	4.334.000	100	Seksi Pembangunan	Kecamatan Purwodadi	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	2	3	3.000.000	3	7.380.000	3	3.000.000	3	3.066.000	3	3.120.000	3			
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	1	600.000	1	840.000	1	600.000	1	636.000	1	600.000	1			
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	1	1.800.000	1	5.895.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.920.000	1			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	600.000	1	645.000	1	600.000	1	630.000	1	600.000	1			
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	0		0		0		0		0		0			

8

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	1	1	1.200.000	1	3.225.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.214.000	1			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	1.200.000	1	3.225.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.214.000	1			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	100	70.717.300	100	153.833.000	100	70.717.000	100	71.835.000	100	72.970.000	100	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Purwodadi	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen	2	1	70.717.300	1	153.833.000	1	70.717.000	1	71.835.000	1	72.970.000	1			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	5	5	17.317.300	5	22.583.000	5	17.467.000	5	17.325.000	5	17.328.000	5			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	53.400.000	1	131.250.000	1	53.250.000	1	54.510.000	1	55.642.000	1			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	3.000.000	100	31.519.000	100	3.000.000	100	3.047.000	100	3.096.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purwodadi	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terseleenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	2	3.000.000	2	31.519.000	2	3.000.000	2	3.047.000	2	3.096.000	2			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	1.500.000	1	19.880.000	1	1.500.000	1	1.547.000	1	1.560.000	1			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	1.500.000	1	11.639.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.536.000	1			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terseleenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	24.300.000	100	33.320.000	100	24.300.000	100	24.684.000	100	25.074.000	100	Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Purwodadi	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	1	2	24.300.000	2	33.320.000	2	24.300.000	2	24.684.000	2	25.074.000	2			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	0	50	11.900.000	50	17.580.000	50	11.900.000	50	12.284.000	50	12.660.000	50			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	12.400.000	1	15.740.000	1	12.400.000	1	12.400.000	1	12.414.000	1			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	12.600.000	100	84.573.000	100	12.600.000	100	12.799.000	100	13.001.000	100	Seksi Pemerintahan Desa	Kecamatan Purwodadi	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terseleenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	9	9	12.600.000	9	84.573.000	9	12.600.000	9	12.799.000	9	13.001.000	9			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tertaksananya Fasilitas/ Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	1	600.000	1	3.293.000	1	640.000	1	639.000	1	671.000	1			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tertaksananya Fasilitas/ Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	1.500.000	1	7.370.000	1	1.530.000	1	1.530.000	1	1.560.000	1			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tertaksananya Fasilitas/ Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	1.500.000	1	8.520.000	1	1.530.000	1	1.530.000	1	1.560.000	1			
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tertaksananya Fasilitas/ Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas/ dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	7.200.000	1	26.390.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	6.600.000	1			
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Tertaksananya Fasilitas/ Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas/ dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	1	600.000	1	28.890.000	0	0	0	0	1	660.000	1			
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Tertaksananya Fasilitas/ Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas/ dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	1.200.000	1	8.860.000	1	1.200.000	1	1.275.000	1	1.200.000	1			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	0	0	1	1.250.000	1	500.000	1	625.000	1	750.000	1			
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tertaksananya Fasilitas/ Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas/ dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tertaksananya Fasilitas/ Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas/ dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Jumlah							3.173.150.310		3.402.766.000		2.304.041.000		2.305.855.000		2.307.699.000				

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasilitasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas)	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi intensifikasi PBB	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi keagamaan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Forkopimcam	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP)
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi
			Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa

4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diarahkan pada Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa; Peningkatan Partisipasi masyarakat meliputi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purwodadi. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dimana mereka ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan juga diarahkan pada Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; Gerakan sayang ibu dan anak, Kecamatan layak Anak, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan BUMDes/BUMDesma, Pembinaan dan Fasilitasi UMKM serta Pendampingan Koperasi Merah Putih dimana Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM), Membangun Desa dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas serta Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diarahkan pada Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan; Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. Sedangkan Program Delegasi Provinsi yang didukung yaitu Mendorong Penguatan Forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan. Serta Mendukung Program Pitulungan Bupati Purworejo Religius Masyarakat.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diarahkan pada Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Penyelenggaraan HUT RI serta Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan. Program ini mendukung Program Nasional Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM) serta mendukung Program Delegasi Provinsi Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa diarahkan pada Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa; Penyelenggaraan fasilitasi Penyusunan APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP. Program ini mendukung Program Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan. Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga diarahkan pada Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa; Kegiatan Konferensi Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Dimana program ini mendukung Delegasi Provinsi Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.

Tabel 4.4. Program Delegasi Provinsi

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Fasilitasi pemberdayaan perempuan	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi pemberdayaan perempuan
		Fasilitasi perlindungan anak	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi perlindungan anak
		Fasilitasi penurunan stunting	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi penurunan stunting
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan
		Fasilitasi pendidikan	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi pendidikan
		Fasilitasi perlindungan lansia	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi perlindungan lansia
		Fasilitasi pemberdayaan disabilitas	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi pemberdayaan disabilitas
		Fasilitasi tenologi tepat guna	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi tenologi tepat guna
		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan	Kecamatan	Kecamatan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan
		Fasilitasi dan pembinaan UMKM	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi dan pembinaan UMKM
		Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat
		Fasilitasi pelestaian lingkungan	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi pelestaian lingkungan
		Fasilitasi desa wisata	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi desa wisata
		Fasilitasi dan pembinaan PKK	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi dan pembinaan PKK
		Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna
		Fasilitasi BUMDes	Kecamatan	Kecamatan	Fasilitasi BUMDes

4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwodadi sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan dan Sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	92,00	92,15	92,30	92,45	92,60	92,75	Tujuan dan Sasaran PD

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Purwodadi yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Purwodadi, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi setiap tahunnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

- a) Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi setiap tahun.
- b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
- c) Camat Purwodadi wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

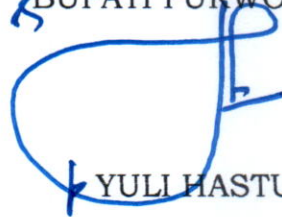
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Tahun 2025-2029 meliputi:

- a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.

- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO, ←



YULI HASTUTI